



LAPORAN SINGKAT
BADAN KERJA SAMA ANTAR PARLEMEN

Tahun Sidang	: 2022 – 2023
Masa Persidangan	: I
Jenis Rapat	: <i>Friendly Talk</i>
Sifat Rapat	: Terbuka
Hari/Tanggal	: Rabu, 22 September 2022
Waktu	: Pukul 14.00 WIB s.d. selesai
Tempat	: Gedung Nusantara III Lantai 2
Acara	: 1. Pertemuan dengan Delegasi Komite Pembangunan Parlemen Eropa (DEVE); 2. Lain-lain
Ketua Rapat	: Dr. Fadli Zon / Ketua BKSAP DPR RI (F-P-Gerindra/A-86)
Sekretaris Rapat	: Endang Dwi Astuti, S.S., M.Si/ Kepala Bagian Sekretariat Kerjasama Bilateral
Hadir	: 1. Putu Supadma Rudana, MBA./ Wakil Ketua BKSAP DPR RI (F-PD/ A-563) 2. Ir. H. Achmad Hafisz Tohir/ Wakil Ketua BKSAP DPR RI (F-PAN/ A-487) 3. Ir. Andreas Eddy Susetyo, M.M./ Ketua GKSB DPR RI-Parlemen Uni Eropa (F-PDIP/A-214) 4. Hon. Mr. Stephane Bijoux/ Ketua Delegasi dan Anggota Komite Pembangunan Parlemen Eropa 5. Hon. Mrs. Hildegard Bentele/ Anggota Komite Pembangunan Parlemen Eropa 6. Hon. Mrs. Michele Rivasi/ Anggota Komite Pembangunan Parlemen Eropa 7. Hon. Mr. Ryszard Czarnecki/ Anggota Komite Pembangunan Parlemen Eropa 8. Mr. Simon Schelde Christensen/ Political Group Staff Parlemen Eropa 9. Ms. Olivia Franck/ Program Manager Kedutaan Besar Uni Eropa di Jakarta 10. Tenaga Ahli BKSAP 11. Sekretariat Bagset. KSB-BKSAP DPR RI

I. Pendahuluan

Dr. Fadli Zon/ Ketua BKSAP DPR RI (F-PGerindra/A-86) menerima kedatangan Delegasi Komite Pembangunan Parlemen Eropa pada pukul 14.30 WIB dan pertemuan terbuka untuk umum.

II. Kesimpulan / Keputusan

1. Ketua BKSAP DPR RI mengapresiasi kunjungan delegasi Komite Pembangunan Parlemen Eropa (*Committee on Development of the European Parliament*) ke Gedung DPR RI.
2. Hubungan diplomasi yang terjalin dengan baik antara Indonesia-Uni Eropa ditandai dengan kolaborasi dan kerjasama di berbagai bidang, termasuk mempromosikan pemulihan ekonomi dan upaya bersama menghadapi tantangan perubahan iklim, sebagaimana tertuang dalam *Partnership and Cooperation Agreement (PCA)*.
3. Uni Eropa merupakan salah satu mitra perdagangan terbesar bagi Indonesia. Pembahasan perjanjian *Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA)* diharapkan dapat segera disepakati sehingga menghasilkan akses pasar baru dan meningkatkan neraca perdagangan Indonesia-Uni Eropa.
4. Sebagai negara yang sama-sama berkomitmen dalam pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau *Sustainable Development Goals (SDGs)*, Parlemen Indonesia berpandangan bahwa setiap kebijakan harus dibuat dan dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip non-diskriminatif, adil, dan transparan – dan terlebih lagi, akan membawa manfaat ekonomi dan sosial yang signifikan bagi semua warga negara, sebagai subjek utama pembangunan dan penerima manfaat.
5. Disampaikan bahwa DPR RI akan menjadi tuan rumah dalam gelaran *the Eight G20 Parliamentary Speakers Summit (P20)*. Tahun ini, P20 akan mengangkat tema “*Stronger Parliaments for Sustainable Recovery*”, yang akan mencakup pembahasan empat isu prioritas yaitu yaitu pembangunan berkelanjutan dan ekonomi hijau; isu-isu strategis, termasuk ketahanan pangan dan energi dan tantangan ekonomi lainnya; parlemen yang efektif dan demokrasi yang hidup; serta inklusi sosial, kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan.
6. Ketua Delegasi Parlemen Uni Eropa, Hon. Mr. Stephane Bijoux, menyampaikan apresiasinya terhadap kesempatan yang diberikan untuk dapat berdiskusi dengan DPR RI. Pihaknya menyatakan bahwa Parlemen Eropa sangat konsen terhadap berbagai upaya untuk menghadapi perubahan iklim. Terkait dengan

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), anggota parlemen dari semua negara harus sama-sama bekerja sama untuk membahas sejumlah hal penting, termasuk perubahan iklim, secara kooperatif. Peran anggota parlemen sangat penting untuk mencapai pencapaian pembangunan dan kepentingan nasional.

7. Anggota Komite Pembangunan Parlemen Eropa, Hon. Mrs. Hildegard Bentele, menyampaikan bahwa saat ini pihaknya sebagai Anggota Parlemen tengah menghadapi tekanan dari para pemilihnya untuk dapat lebih memperhatikan isu perubahan iklim. Untuk itu, peran anggota parlemen sangat vital dalam pembentukan kebijakan-kebijakan yang berdampak secara langsung pada berbagai lapisan kehidupan bermasyarakat. Dengan demikian, kunjungan Parlemen Eropa ke Indonesia dilakukan untuk mengetahui Langkah konkret apa yang telah dilakukan oleh parlemen dan pemerintah Indonesia terkait isu perubahan iklim.
8. Anggota Komite Pembangunan Parlemen Eropa, Hon. Mrs. Michele Rivasi, menyampaikan bahwa secara pribadi pihaknya telah melakukan kunjungan ke Indonesia sejak 40 tahun lalu dan melihat berbagai perkembangan dan pembangunan yang sangat pesat. Pihaknya juga menghimbau kepada Anggota Parlemen Indonesia untuk dapat menarik perhatian dan mengambil berbagai kebijakan yang diperlukan untuk mengatasi perubahan iklim. Terkait dengan konflik Ukraina-Rusia, pihaknya mengapresiasi bahwa Indonesia memiliki *standing point* yang cukup jelas untuk tidak memihak, namun Parlemen perlu menanggapi terkait adanya rencana pemerintah Indonesia yang berkeinginan untuk memberi migas dari Rusia dengan harga 39% lebih rendah.
9. Anggota Komite Pembangunan Parlemen Eropa, Hon. Mr. Ryszard Czarnecki, menyampaikan saat ini menjadi momen untuk kita dapat bekerja bersama. Kerjasama menjadi faktor yang sangat penting untuk dilakukan di masa pemulihan ekonomi seperti sekarang ini. EU memiliki banyak kerjasama dan sumber anggaran yang cukup untuk menjalankan kerja sama dengan negara-negara lain seperti Indonesia. Untuk itu, pertemuan ini kita jadikan pembuka untuk diskusi lebih lanjut terkait kerjasama ini.
10. Terkait dengan transisi energi, Ketua BKSAP menyampaikan bahwa baru-baru ini Rapat Paripurna DPR RI menyetujui Rancangan Undang-Undang Energi Baru dan Energi Terbarukan (EB-ET) menjadi RUU inisiatif DPR. Hal ini sejalan dengan target bauran energi sebesar 23 persen pada 2025 dan 70 persen pada tahun 2050 mendatang. Kebijakan yang sekaligus merevisi aturan energi minyak bumi ini, dinilai kan mendukung berbagai upaya bersama dalam menurunkan pemanasan global.
11. Wakil Ketua BKSAP DPR RI, Putu Supadma Rudana, MBA., menyampaikan pentingnya kerja sama dan kerja bersama yang dilakukan oleh negara-negara ASEAN dengan Uni Eropa. Terlebih lagi Indonesia akan memegang presidensi ASEAN pada tahun 2023 mendatang, sehingga menjadi waktu yang tepat untuk

menjalin kerjasama. Selain itu, ASEAN dan Uni Eropa memiliki berbagai kesamaan baik cara pandang terhadap demokrasi dan mengenai iklim. Indonesia memiliki berbagai sumber daya energi terbarukan yang melimpah, hanya saja saat ini teknologinya belum cukup baik. Indonesia juga memiliki sumber daya manusia yang sangat banyak, untuk itu upaya penguatan kerja sama di bidang *people-to-people* contact sangat diperlukan. Selain itu sektor pariwisata juga perlu didorong untuk adanya berbagai kerjasama, termasuk kerja sama bebas visa dengan negara-negara di Uni Eropa sehingga bisa lebih banyak mendatangkan turis dari negara-negara Uni Eropa.

12. Wakil Ketua BKSAP, Ir. H. Achmad Hafisz Tohir, menyampaikan bahwa Parlemen Indonesia terus berkomitmen untuk mempromosikan praktik dan produksi minyak sawit yang berkelanjutan. Sebagaimana kita ketahui bersama, Rusia dan Ukraina adalah penghasil minyak bunga matahari dan Indonesia adalah penghasil palm oil. Konflik Rusia - Ukraina mengurangi jumlah peredaran minyak yang ada di dunia. Indonesia dan Uni Eropa memperkuat komitmen dalam Paris Agreement, Indonesia berusaha untuk mencegah penggunaan karbon. Transisi Energi yang dilakukan dengan cepat di negara-negara Uni Eropa, dengan penurunan emisi gas mencapai 55 persen di tahun 2030, tentu akan menyulitkan bagi perekonomian negara-negara berkembang seperti Indonesia.
13. Ketua GKSB DPR-Parlemen Uni Eropa, Ir. Andreas Eddy Susetyo, M.M., menyatakan bahwa saat ini waktu yang sangat tepat untuk melakukan kerjasama dan membuat berbagai keputusan, mengingat The Fed terus menaikkan suku bunga dan berimbas pada sejumlah pasar saham secara global. Selain krisis pada bidang energi, juga terdapat krisis pada sektor pangan. Untuk itu pemerintah terus mendorong berbagai kebijakan terkait *green economy*. Indonesia juga telah mengesahkan aturan dan berbagai kebijakan mengenai pajak karbon. Untuk itu perlu adanya diskusi lebih lanjut bagaimana kita bisa melakukan kerjasama terkait perubahan iklim. Akan sangat sulit bagi negara berkembang seperti Indonesia, untuk dapat melakukan transisi energi dengan cepat, untuk itu tentu bantuan dari negara-negara Uni Eropa dalam hal pendanaan sangat mutlak diperlukan.
14. Pada akhir pertemuan, Ketua Delegasi Parlemen Eropa menyampaikan bahwa saat pemerintah Uni Eropa dihadapkan dengan kendala untuk mengalokasikan 30% anggaran untuk melakukan transisi energi dan perubahan iklim. Akan sangat penting bagi pemerintah Indonesia untuk menaruh investasi dan mengalokasikan anggaran semaksimal mungkin untuk transisi energi. Pemerintah perlu didorong untuk mengeluarkan kebijakan dan aturan yang mendukung transisi energi. Terkait dengan kedaulatan pangan, Indonesia sebagai negara dengan berbagai sumber daya alam yang melimpah dinilai mampu untuk mewujudkan kedaulatan pangan secara nasional.

III. Penutup

Rapat ditutup pada pukul 15.38 WIB.

Jakarta, 22 September 2022

a.n. Ketua Rapat
Sekretaris Rapat,

Endang Dwi Astuti, S.S., M.Si.
NIP. 197206221999032001